

FILSAFAT SOSIAL
(Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia)



Firdaus M. Yunus

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

Social philosophy is a branch of philosophy which studies social issues in a critical, radical and comprehensive manner. Since it was formulated, Social philosophy has deconstructed the public understanding in term of not all the creations under the sky directly regulated by the power of God forever and ever. Demolition of public understanding on a large scale occurred just as the emergence of the French revolution, which undermined the feudal social order and begin the process of democratization that generated the spectacular surprises, since no one had previously imagined that a social order which was supposed unchangeable and forever blessed by the will of God has been overhauled and replaced by thoughts of human being. This situation has been strengthen by the development of Frankfurt's school which developed a critical social science which gradually has been spread to all over the world.

Kata Kunci: Filsafat sosial, Pribumisasi

A. Pendahuluan

Filsafat adalah 'induk' ilmu pengetahuan. Istilah filsafat telah dikenal manusia sejak 2700 tahun yang lalu. Pada masa Yunani kuno, di Militos, Asia Kecil, tempat perantauan orang Yunani, di sanalah awal mula munculnya filsafat. Mula-mula jejak sejarah awal filsafat ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh pemikir besar pada zamannya, seperti Thales, Anaximandros dan

Firdaus M. Yunus

Anaximenes.¹ Dari ke tiga filosof besar ini Thaleslah orang pertama yang mempersoalkan substansi terdalam dari segala sesuatu. Dan dari situlah munculnya pengertian-pengertian kebenaran yang hakiki.

Pencarian kebenaran tentu akan selalu ada mata rantai filsafat yang pada tataran praksisnya menjadi abadi, yaitu bentuk falsifikasi pada tesis, anti tesis, aksi, reaksi, konstruksi dan dekonstruksi. Kebenaran dengan demikian akan selalu menjadi kebenaran sementara sebab pada kondisi tertentu akan terfalsifikasi dalam bentuk yang beragam rupa sesuai dengan parameter dan indikator yang mengiringinya, baik yang bersifat aksidensial, lokalitas, kontekstualitas, maupun karena sudah lemahnya esensi kebenaran tersebut yang mencengkram suatu zaman. Sedangkan falsifikasi lahir biasanya disebabkan karena sebuah kebenaran telah memunculkan berbagai persoalan kehidupan yang kemudian terbongkar dan menyesatkan sehingga membutuhkan kebenaran yang baru lagi.

Berpijak dari asumsi tersebut, maka para filsuf yang datang belakangan asyik dalam perburuan yang tiada bertepi “kenalilah dirimu sendiri” pertanyaan besar yang diajukan oleh Socrates ini menjadi padang perburuan baru pemikiran kefilosofatan. Perburuan ini kemudian diteruskan oleh muridnya Plato dan Aristoteles, dan akhirnya berkembang hingga cabang-cabangnya yang terkecil, sejak filsafat muncul masa Yunani kuno, abad pertengahan, hingga abad modern.

Dari orientasi pemikiran terhadap diri manusia inilah, munculnya orientasi pemikiran terhadap segala alam yang ada, untuk diabdikan bagi pemenuhan kebutuhan manusia, munculnya ilmu pengetahuan yang khusus, beserta implementasinya yang berwujud teknologi peletak dasarnya adalah para filsuf. Dewasa ini, tugas filsafat belum selesai, karena masih banyak misteri yang membutuhkan arahan tepat bagi kehidupan manusia modern.² Untuk itu, filsafat dan ilmu pengetahuan meskipun terlihat suatu pasangan yang kelihatan kurang seimbang. Filsafat

¹ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*. (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 5-14

² Lois O. Kattsof, *Pengantar filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, (1996), hal. I

merumuskan pertanyaan, ilmu pengetahuan memberikan jawaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, filsafat kelihatannya tidak pernah maju. Di lain pihak, sejarah suatu ilmu tertentu kurang penting bagi kita sekarang, karena jawaban-jawaban terdahulu sering kali sudah dikoreksi, sedangkan pertanyaan-pertanyaan dari sejarah filsafat masih tetap aktual bagi manusia masa kini.³ Sejarah filsafat mirip suatu museum yang memuat koleksi raksasa dari pendapat-pendapat filsuf besar di dunia yang kian hari kian bertambah. Dengan demikian museum besar akan semakin berwarna apabila seluruh ilmu cabang yang lahir dari filsafat terus berkembang. Astronomi (ilmu tentang bintang-bintang dan tata surya) dan fisika (ilmu alam) merupakan ilmu cabang pertama yang memisahkan diri dari filsafat, kemudian diikuti oleh ilmu biologi, geologi dan kimia. Pada abad ke 19 salah satu cabang ilmu baru muncul yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sosiologi dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, sejarah, ilmu jiwa, dan sebagainya.

Pembagian ilmu-ilmu sosial kemudian mengkristal pada paruh pertengahan abad ke 19, namun baru periode 1850-1914 diversifikasi intelektual muncul dalam struktur disiplin ilmu-ilmu sosial secara resmi diakui oleh berbagai universitas utama di Eropa. Beberapa ilmuan yang menulis buku-buku sosial seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, William Petty dan Hugo Grotius. Pada paruh abad ke 19 muncul nama Thomas Malthus, David Ricardo, Francois Guizot, Alexis de Tocqueville, Johann Herder dan Johan Fichte. Penciptaan beragam disiplin ilmu sosial merupakan bagian dari upaya umum abad 19 untuk melindungi dan memajukan ilmu pengetahuan 'objektif' tentang realitas atas dasar penemuan empiris.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masya-

³ Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. ix

⁴ Immanuel Wallerstein, *Lintas batas ilmu sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), hal. 19-20

Firdaus M. Yunus

rakat dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Sebagai ilmu yang bersentuhan dengan realitas sosial kemasyarakatan, maka sosiologi dalam kondisi tertentu membutuhkan pendekatan filsafat sosial agar analisis sosiologisnya lebih kritis dalam melihat perubahan masyarakat.

B. Konstruksi Filsafat Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial

Filsafat sosial merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari persoalan sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal dan komprehensif. Sejak Plato, dan Aristoteles kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi, manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya, kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemaha-kuasaan Allah, ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan.

Pemahaman masyarakat Eropa sedikit demi sedikit berubah sejak masa *renaissance*.⁶ Manusia pada saat itu sekuat tenaga berusaha mencari alternatif baru, agar dapat keluar dari kungkungan absolutisme Gereja, dan sejak itulah peranan manusia menjadi besar, manusia menyadari hanya merekalah yang dapat mengatur diri mereka sendiri.⁷ Locke, Berkeley, Hume,

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 3-4

⁶ Renaissance merupakan sebuah gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran kembali itu orang kembali pada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan keindahan. Zaman renaissance juga berarti zaman yang menekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, dalam mengadakan eksplorasi, eksperimen, dalam mengembangkan seni, sastra dan ilmu pengetahuan di Eropa. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 954

⁷ K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hal. 44

Montesquieu, Voltaire, Diderot, d'Alembert, dan Rousseau menyuarakan paham baru untuk menentang kepercayaan lama, bahwa segala-galanya di bawah kolong langit telah langsung diatur oleh kekuasaan Tuhan untuk selama-lamanya.

Lahirnya revolusi Prancis tahun 1789 M yang kemudian diikuti oleh revolusi baru tahun 1830 dan 1848,⁸ telah meruntuhkan susunan masyarakat feodal dan mengawali proses demokratisasi, dialami oleh banyak orang sebagai sebuah kejutan. Tidak pernah sebelumnya orang membayangkan bahwa suatu orde sosial yang disangka tidak terubahkan dan selamanya terbekati oleh kehendak Allah, telah dirombak dan diganti oleh pikiran usaha manusia sendiri. Gagasan-gagasan barupun tumbuh pada keyakinan bahwa manusia 'bebas' untuk mengatur dunianya. Dengan demikian struktur sosial berabad-abad tidak dipermasalahkan, tiba-tiba menjadi masalah. Di sinilah sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan.

Abad 19 ditandai oleh optimisme besar terhadap datangnya zaman baru yang lebih baik, para sarjana ilmu alam berkeyakinan lahirnya industrialisasi yang dapat menciptakan kemakmuran manusia. Para Ilmuan sosial mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka akan mampu menemukan hukum-hukum sosial yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Optimisme yang besar tersebut ternyata tidak serta merta terealisasi karena pada abad 19 revolusi Prancis terjadi, dan kekhawatiran-kekhawatiranpun telah menyelimuti masyarakat. Dalam situasi yang ambivalen ini, sosiologi mulai berkembang yaitu dengan tampilnya dua aliran yang sifatnya saling bertentangan. *Pertama*, aliran konservatif, yang menginginkan kembali ke masa feodal, yaitu zaman hegemoni⁹ agama, di mana

⁸ Lihat, Hamersma, hal. 51

⁹ Secara etimologis, kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani, *egemonia/egemon*, yang berarti pemimpin/penguasa dalam konotasi lazimnya berhubungan dengan konteks kenegaraan. Sejak abad ke-19, hegemoni memperoleh makna baru. Pengertiannya menjadi lebih sering merujuk pada situasi tertentu terjadinya dominasi politik dari suatu negeri kuat (super power) terhadap negeri lain (lemah) yang biasa juga disebut dengan istilah imperealisme (William, 1983: 144). Memasuki abad ke-20, kata hegemoni menjadi kian penting berkat penggunaannya yang intensif dan spesifik oleh 'kubu; Marxisme. Dalam kubu ini sendiri, istilah hegemoni sesungguhnya mulai dikenal kira-kira sejak tahun

Firdaus M. Yunus

agama merupakan kekuatan yang mengintegrasikan masyarakat. *Kedua*, aliran progresif, aliran ini juga menyesal atas perpecahan dan anarki, tetapi tidak bersedia kembali ke zaman feodal. Beberapa tokoh progresif seperti, Saint Simon, Charles Fourier, Pierre Joseph Proudhon dan Auguste Comte meramalkan bahwa abad 19 merupakan abad 'industri' dan terbentuknya orde sosial baru. Pada abad ini agama bukan lagi kekuatan yang melembaga semua bidang masyarakat, melainkan kecerdasan manusia. Masyarakat baru akan dibangun atas dasar suatu perencanaan rasional yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁰

Tampilnya Auguste Comte dengan bukunya 'Sistem Filsafat Positif' telah memberikan warna tersendiri terhadap kajian kemasyarakatan secara kritis, sistematis dan intensif secara modern pada abad ke 19. Sejak kemunculannya hingga saat ini sosiologi masih dibayang-bayangi oleh pengaruh filsafat dan psikologi, hal semacam itu wajar karena kelahiran sosiologi di tengah persaingan pengaruh antara filsafat dan psikologi.¹¹

Harus diakui kajian terhadap persoalan kemasyarakatan bukan sesuatu yang baru, karena menunggu adanya ilmu-ilmu lain yang kemudian menyatu ke dalam suatu keseluruhan yang integral sebagai ilmu tersendiri.¹² Maka ilmu sosial terus berkembang merambah ke seluruh Eropa, dan filsuf-filsuf sosial

1883/1884, ketika Plekhanov menggunakan istilah ini untuk menunjukkan adanya dominasi (hegemoni) kepemimpinan proletariat yang mewakili aliansi berbagai kelompok sosial dalam berhubungan dengan kekuasaan tsar/tsarist police state (Bocock, *Op. Cit.* hal. 125). Tetapi, Gramsci-lah yang berjasa mempopulerkannya hingga mendorong lahirnya kajian-kajian yang beragam. Dalam terminologi Gramsci, hegemoni tidak hanya berarti satu dominasi politik dalam relasi antar-negeri, tetapi juga merupakan dominasi politik dari suatu kelas (kuat) terhadap kelas (yang lemah) dalam relasi antar kelas sosial. Malahan, lebih dari sekedar dominasi politik, dalam konteks Gramsci, hegemoni juga bisa berarti dominasi pada bidang-bidang lainnya yang lebih umum seperti, pandangan hidup, kebudayaan, ideologi dan sebagainya, *secara lebih riil catatan ini diambil tanpa ada pengubahan* dari, Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Mizan: Bandung, 1996), hal. 28.

¹⁰ K.J. Veeger, *Realitas sosial; Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 7-8

¹¹ Gorge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimanda, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 1

¹² Lihat, K.J. Veeger, hal. 3

dan mazhab¹³ sosial terus bermunculan di mana-mana, salah satu yang paling terkenal adalah mazhab Frankfurt. Mazhab ini menunjukkan pada sekelompok sarjana yang bekerja pada lembaga untuk penelitian sosial di Frankfurt. Lembaga ini didirikan oleh Felix Weil pada tahun 1923, dan mengalami puncak keemasan ketika Max Horkheimer menjadi direktur pada tahun 1930 M. Horkheimer merupakan tokoh kiri yang mengkritik teori tradisional untuk menganalisis fungsi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam masyarakat.¹⁴ Teori kritis akan melawan semua bentuk teori yang mau bersikap objektif dengan mengambil jarak terhadap situasi historis. Teori kritis menjadi visi dan misi dari madhab Frankfurt dalam melakukan aksi pemikiran para tokoh-tokohnya.

Selain Horkheimer, Harbert Marcuse dalam mengembangkan ide-ide pokoknya melakukan rekonstruksi rasionalitas dengan melahirkan bermacam-macam rasio dalam tataran praksisnya, yaitu rasio instrumental, rasio yuridis, rasio kognitif dan rasio ilmiah. Sedangkan Habermas sebagai tokoh paling kritis dalam melihat fenomena sosial masyarakat berusaha merekonstruksi nalar masyarakat sehingga akan terbentuk ruang yang steril dari dominasi yang akan membawa sikap pada emansipatoris. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Habermas mengkritisi mecenya teori kritis dengan mendasarkan teorinya pada epistemologi praksis dari rasionalitas ilmu. Tujuannya adalah agar terbentuknya masyarakat komunikatif yang terbebas dari dominasi berbagai kekuatan melalui berbagai argumentasi untuk mencapai sebuah klaim kesahihan yang rasional tanpa paksaan.

¹³ Terminologi Mazhab (selanjutnya untuk disebut sebagai 'Aliran') disadari mempunyai berbagai penafsiran yang beragam. Kata mazhab biasanya terlahir dalam term *fiqh* untuk menyebut suatu cabang ilmu keislaman yang mempelajari tentang hukum-hukum agama. Penafsiran liar dari kata mazhab terdapat dalam buku *The Concise Encyclopaedia of Islam*, istilah itu diartikan sebagai sistem berpikir (*a system of thought*). Dalam buku *A Popular Dictionary of Islam*, Ian Richard Newton memberi penafsiran sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum. Lihat, Edy A. Effendi (ed), *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, (Jakarta: Zaman, 1999), hal. 4

¹⁴ Sunarto, 'Konstruksi epistemologi Max Horkheimer: Krtik atas masyarakat modern', dalam. *Epistemologi kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hal. 94

Firdaus M. Yunus

Lembaga penelitian sosial Frankfurt kemudian semakin kuat karena didukung oleh sarjana-sarjana dari berbagai bidang keahlian, supaya persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat dapat dipelajari dari berbagai segi ilmiah, seperti Horkheimer ahli dalam Filsafat Sosial, Friedrich Pollock (Ekonomi), Leo Lowenthal (Sosiologi, kesusasteraan), Walter Benjamin (Kesusasteraan), Theodor W. Adorno (Musikologi, Filsafat, Psikologi, Sosiologi), Erich Fromm (Psikoanalisa), Harbert Marcuse (Filsafat), Edmund Husserl (Filsafat), dan Jurgen Habermas (Filsafat).¹⁵

Mazhab Frankfurt dalam prakteknya menggunakan filsafat sosial dalam membangun 'teori kritis'.¹⁶ Teori kritis yang dibangun dalam mazhab Frankfurt paling besar dipengaruhi oleh Marx dan Hegel. Melalui kedua pemikir besar tersebut teori-teori sosial mengalami perkembangan. Seperti teori Marx dalam melihat hubungan-hubungan produksi dan bentuk-bentuk pengorganisasian sosial serta ketergantungan produsen dengan bukan produsen. Sementara Hegel memandang kehidupan sosial sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, berkembang menuju arah yang pasti.¹⁷ Konstruksi teori sosial dari tokoh-tokoh mazhab Frankfurt tersebut telah menyebabkan penyebaran ilmu sosial kemudian terus meluas ke seluruh dunia. Pada tahun 70-an di Amerika pengkajian terhadap ilmu-ilmu sosial berkembang secara pesat, alasannya sederhana, sosiologi tidak ingin kalah dengan

¹⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 176-177

¹⁶ Teori kritis menurut Habermas bukan suatu 'teori ilmiah' sebagaimana dikenal secara luas dikalangan akademis. Habermas melukiskan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam keterangan-keterangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi). Dalam keterangan itulah teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif seperti dianut oleh teori-teori positivistik. Teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan fakta-fakta yang transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutup ilmu yang dimaksudkan bahwa teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian teori kritis tidak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental yang bersifat empiris. Lihat, Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 30

¹⁷ Hans Fink, *Filsafat Sosial dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 137-138

ilmu alam dan ekonomi yang lebih dahulu menggunakan model berpikir matematisasi. Sosiologi tidak ingin ketinggalan dalam atmosfer perkembangan akademik yang pragmatis di Amerika, maka dengan segala cara dan keahlian berupaya mengikuti jejak disiplin ekonomi, yaitu menjadi bagian dari ilmu-ilmu keras, agar memperoleh legitimasi dan layak dianggap sebagai 'ilmu.

George Ritzer, sebagai sosiolog Amerika kontemporer berupaya melakukan rekonstruksi pengilmiahan tersebut dengan mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Weber. Bagi Ritzer, membawa ilmu dan humaniora dalam satu atap ala Weber adalah dengan melakukan rekonstruksi sosiologi humanis menuju praxis. Perdebatan tentang pengilmiahan sosiologi di Amerika dipicu oleh banyak sosiolog, salah satunya adalah Robert Nisbet, yang menyindir bahwa sosiologi bukan ilmu tetapi masuk ke dalam ruang lingkup seni. Di sisi lain bahwa mempelajari perilaku masyarakat tidak perlu dengan teori tetapi cukup dengan *common sense*, dalam hal ini harus dipandang dalam dua hal. *Pertama*, pandangan itu turun dari cara pemahaman yang berbasis pada sosiologi pengetahuan yang berfokus pada pengetahuan sehari-hari orang awam. *Kedua*, pernyataan tersebut lebih merupakan sinisme kaum positivis yang menganggap bahwa hanya fenomena alam yang bisa dijelaskan lewat postulat, paradigma, teori, konsep, perspektif dan lain-lain. Sementara fenomena sosial cukup dengan nalar awam, dalam batas tertentu fenomena sosial bisa dijelaskan dengan *rigorous theory*, tetapi pada sisi lain teori tersebut gagal dan yang diperlukan cara interpretatif untuk memperoleh kedalaman, bahkan tidak tertutup kemungkinan penjelasan yang agak spekulatif juga diperlukan dalam rangka memperoleh alternatif penjelasan. Dalam hal ini spekulasi memungkinkan orang berpikir kreatif, bahkan kaum post strukturalis kadang bersifat 'sewenang-wenang' dengan metode semiotiknya dalam menjelaskan fenomena sosial.¹⁸

¹⁸ Heru Nograho, 'Pengilmiahan dan ambiguitas sosiologi'. Dalam, Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. Xiv-xvi

C. Filsafat Sosial di Tengah Komplektisitas Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga hal, *pertama*, perbedaan, *kedua*, pada waktu berbeda, *ketiga*, di antara keadaan sistem sosial yang sama. Dengan demikian perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan.¹⁹ Terhadap perubahan sosial, sosiolog sejak beberapa dekade terakhir telah memberikan perhatian khusus dalam melihat perubahan sosial, setidaknya mereka melihat dalam perkembangan sosial yang melukiskan proses perkembangan potensi yang terkandung di dalam sistem sosial. Bentuk proses sosial lain yang ditekankan para sosiolog adalah peredaran sosial, proses sosial ini tidak lagi menuju arah tertentu tetapi juga tidak serampangan karena ditandai oleh pola edaran, yaitu keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar muncul kembali pada waktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi pada masa lalu. Kemudian terjadi perulangan yang disebabkan oleh kecenderungan permanen di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan cara bergerak. Dengan demikian masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan sebagai objek semu yang kaku, tetapi sebagai aliran peristiwa terus menerus tanpa henti.²⁰

Gerakan sosial secara historis adalah fenomena universal dan bagian sentral modernitas, gerak sosial berkaitan erat dengan perubahan struktural. Ada enam tipe gerakan sosial terlihat dalam masyarakat. *Pertama*, gerakan sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang diinginkan, ada yang terbatas tujuannya, karena hanya untuk mengubah aspek tertentu masyarakat, tanpa menyentuh inti struktur institusinya. Gerakan ini merupakan gerakan perubahan dari dalam, bukan merubah masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, gerakan yang berbeda dalam kualitas perubahan yang diinginkan, sebab ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang memperkenalkan institusi baru, hukum

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terjemahan, Alimandan, (Jakarta: Prenada, 2007), hal. 3

²⁰ Lihat, Piotr Sztompka, hal. 3-9

baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Gerakan semacam ini ingin membentuk masyarakat ke dalam satu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan dengan menekankan pada sesuatu yang baru. *Ketiga*, gerakan yang berbeda dalam target perubahan yang diinginkan, ada yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial dan ada yang memusatkan perubahan individual. *Keempat*, gerakan sosial yang berbeda mengenai arah yang diinginkan. Kebanyakan gerakan mempunyai arah positif. Gerakan seperti itu biasanya mencoba memperkenalkan perubahan tertentu, dan mempertahankan ketika gerakan dimobilisasi ke arah yang negatif. *Kelima*, gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi logika tindakan. Ada yang mengikuti logika instrumental, gerakan ini umumnya berambisi pada kekuasaan. Dan ada logika pernyataan persamaan yang berjuang menegaskan identitas, seperti berjuang untuk mendapatkan pengakuan nilai-nilai, emansipasi, otonomi, dan lain sebagainya. *Keenam*, perbedaan tipe gerakan sosial yang ditemukan dalam epos sejarah berlainan, seperti sejarah sosial pra modern dan sejarah sosial modern.²¹

Gerakan sosial seperti di atas, bila dilihat dari perspektif paradigma²² yang dibangun oleh Kuhn, bahwa suatu paradigma gerak tertentu dibangun oleh suatu pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan pengetahuan. Kuhn menegaskan bahwa bidang pengetahuan disebut ilmiah bila memiliki paradigma tunggal, maka sosiologi yang sedang dalam taraf perkembangan multi perspektif dianggap sebagai *pre science*. Dengan demikian cara memahami fenomena sosial berbeda dengan cara memahami fenomena alam. Fenomena sosial memiliki banyak aspek sehingga satu perspektif saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan multi perspektif sesuai dengan karakter

²¹ Lihat, Piotr Sztompka, hal. 332-335

²² Paradigma adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan membantu membedakan antara komunitas ilmunan yang satu dengan komunitas ilmunan yang lain. Kemudian paradigma menggolong-golongkan, mendefinisikan dan menghubungkan antara eksamplar, teori-teori, metode-metode serta instrument-instrumen didalamnya. lihat Ritzer, hal. 127

Firdaus M. Yunus

fenomena sosial yang multi dimensional. Model tunggal paradigma Kuhn tidak cocok untuk sosiologi.

Ritzer merupakan orang yang mengakomodasi beberapa hal dari Kuhn, terutama model paradigma dan sekaligus mengambil ide Friedrich tentang dual paradigma. Bagi Ritzer, sosiologi sebagai *body of science* tidak harus terjebak dalam penerapan model tunggal paradigma secara kaku, namun sosiologi memiliki paradigma jamak. Ada tiga paradigma yang beroperasi dalam sosiologi, *pertama*, paradigma fakta sosial dengan eksemplar teori pemikiran Durkheim tentang 'fakta sosial' yang cara memahaminya bisa seperti metode ilmu alam. Paradigma fakta sosial cenderung kepada metode interviu, kuesioner, komparatif dan memakai metode observasi. *kedua*, paradigma defenisi sosial, dengan eksemplar teori Weber tentang makna-makna subjektif realitas sosial dengan metode interpretatif. Paradigma ini cenderung pada penggunaan metode observasi. *Ketiga*, paradigma perilaku sosial dengan eksamplar teori B.F. Skinner tentang makna psikologi sosial dalam tindakan sosial dengan metode pemahaman makro-mikro. Paradigma perilaku sosial metode yang digunakan lebih banyak metode eksperimen.²³ Bagi Ritzer, perjuangan sosiologi menjadi ilmiah ditujukan dalam kajian meta teori paradigma terintegrasi. Fenomena sosial bisa dipahami melalui pendekatan paradigma yang terintegrasi tersebut. Ketiga paradigma sosiologi tersebut bukan merupakan hal terpisah, namun karena realitas sosial yang bersifat multi dimensional, maka bisa digunakan secara terpadu, apakah diterapkan dengan cara proporsional atau eklektik.²⁴

Gambaran perubahan dan paradigma tersebut, membutuhkan analisis sosiologi dan analisis filsafat sosial secara mendalam. Sosiologi dibutuhkan untuk melihat masyarakat pada tataran luaran dengan mengandalkan observasi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁵ Sementara filsafat Sosial diperlukan untuk menganalisis persoalan-persoalan sosial secara

²³ Gorge Ritzer, hal. 129

²⁴ Lihat, Heru Nogroho, hal. xviii-xix

²⁵ Lihat, Soerjono Soekanto, hal. 12-14

mendalam, memberikan pandangan lebih luas dan koreprehensif dengan menggunakan pendekatan teori-teori filsafat.

Filsafat sosial sebagai ilmu kritis dalam melihat dan menganalisis persoalan sosial kemasyarakatan akan terselamatkan dari bahaya-bahaya legalisme, kemunafikan, dan penglarutan kepribadian di satu pihak, dan suatu otonomi di lain pihak. Dengan demikian filsafat sosial dalam hal ini bertitik tolak dari manusia yang dwi tunggal. Individu dan masyarakat.

Peran filsafat sosial dalam ranah kehidupan sosial harus berpartisipasi dalam melayani manusia. Karena itu para ilmuan sosial harus menentukan keberpihakannya kepada siapa mereka melayani. Filsafat sosial harus menolak pemisahan antara teori dan praktek, dan semua praktek dan teori harus didiskusikan. Kepentingan praktek bagi ilmuan sosial adalah untuk membebaskan manusia dari ketertindasan dengan demikian posisi mereka sebagai manusia dapat berubah.

Filsafat sosial melihat masyarakat sebagai kesatuan manusia dalam kebersamaan. Melalui kebersamaan itu kemudian filsafat sosial melihat struktur, proses dan makna sosial, baik pada masa lalu atau sekarang, yang di dalamnya mempelajari nilai-nilai, tujuan-tujuan individu, kelompok dan kelas sosial.²⁶ Filsafat sosial sebagai ilmu kritis mempunyai karakter berbeda dari ilmu sosial positif. Karena sifatnya yang kritis, maka filsafat sosial mengenal apa yang disebut sebagai praxis dimana aksi berperan sebagai sumber dan pengesahan teori.

D. Jejak Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia

Pengkajian terhadap ilmu-ilmu sosial secara resmi pada universitas-universitas di Eropa baru di mulai pada abad ke 20 M. Sementara kajian ilmu sosial di Indonesia baru berkembang pada tahun 1960-an, hal ini dapat dilacak dari beberapa periodeisasi tertentu, *pertama*, sebelum tahun 1960-an pengaruh ideologi, *kedua*, tahun 1960-an berkembangnya teori pembangunan, *ketiga*, periode 1970-an berkembangnya isu pribumisasi ilmu-ilmu sosial, *keempat*, periode 1980-an berkembangnya gugatan atas dominasi positivis-

²⁶ Donald E. Comstock, *A. Method for Critical Research*, (Departement of Sociology, Washington State University, 1980), hal. 6

Firdaus M. Yunus

me dan strukturalisme fungsional dalam ilmu sosial. Fenomena tersebut telah menggugah ilmuan sosial untuk mencari filosofi dan ideologi alternatif untuk membangun ilmu sosial Indonesia, salah satu alternatif adalah penggalian filosofi dan ideologi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Gerakan ini pada perkembangannya kemudian dikenal sebagai gerakan pribumisasi ilmu-ilmu sosial. *Kelima*, periode 1990-an berkembangnya perspektif kritis dalam melihat persoalan sosial kemasyarakatan.²⁷

Mengklasifikasikan periodeisasi pada dasarnya mengalami kesulitan tersendiri, antara lain: (1) pendekatan periodeisasi cenderung memotong peristiwa sejarah. Padahal pada kenyataannya sejarah tidak bisa dipotong menjadi bagian-bagian yang kaku dalam tahun-tahun. (2) rencana periodeisasi sejarah seperti pada poin di atas tampak terlalu memaksa diri, sehingga sejarah dipaksakan untuk dikotak-kotakkan dalam periode tertentu. Untuk menghindari kesulitan tersebut maka harus dilihat historisitas ilmu-ilmu sosial di Indonesia seperti fase kelahiran, dan fase perkembangannya. Dengan mengetahui fase tersebut akan membantu untuk menjelaskan corak epistemologisnya.

Bila melihat dari perspektif teori sosial, maka teori sosial yang digunakan hanya teori yang mendukung pembangunan, sementara teori-teori kritis kurang dikembangkan, sehingga perkembangan ilmu sosial di Indonesia hanya dikuasai oleh suatu 'monisme'²⁸ tertentu, dengan corak epistemologi positivisme dan strukturalisme fungsional, terakhir baru dikembangkan teori kritis mazhab Frankfurt, postmodernisme dan pemikiran epistemologi Islam.

Gambaran di atas membutuhkan suatu paradigma ilmu sosial baru yang didasarkan atas kultur masyarakat Indonesia.

²⁷ Heri Santoso, "Dimensi epistemologis dalam indeginisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia (sebuah pelacakan awal)", dalam, *Jurnal filsafat*, (Yogyakarta: UGM, 1997), hal. 190

²⁸ Monisme, teori yang menggambarkan bahwa segala hal berasal dari satu sumber terakhir (tunggal). Monisme adalah, keyakinan bahwa realitas adalah satu, dan segala sesuatu lainnya adalah ilusi, berbeda dengan dualisme dan pluralisme. Monisme dapat dimengerti sebagai keanekaan benda-benda yang dapat ditelusuri kembali pada satu sumber yang berbeda dari benda-benda itu sendiri. Lihat, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 670-671.

Dalam merumuskan paradigma baru tersebut peran filsafat ilmu menjadi sangat penting. Filsafat ilmu diharapkan memberi refleksi kritis sekaligus mencari alternatif yang berkaitan asumsi-asumsi dasar ilmu-ilmu sosial.²⁹

E. Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia

Sebuah tantangan yang harus diemban oleh para ilmuwan sosial di Indonesia yaitu bagaimana mengembangkan gerakan pribumisasi³⁰ (*indigenisasi*) ilmu-ilmu sosial ke dalam analisis konseptual dengan memakai pikiran-pikiran dasar yang cocok dengan kondisi riil masyarakat Indonesia. Menurut Ignaz Kleden, pribumisasi ilmu-ilmu sosial harus seperti gerakan revolusioner dalam dunia yang biasanya mendasarkan diri pada kekuatan dan kemampuan sebagai *claim universal*, yaitu sebuah klaim yang diperkenalkan oleh ilmu-ilmu alam yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap ilmu-ilmu sosial yang seolah-olah dalam keadaan tertentu berlaku dalam ilmu-ilmu sosial.³¹

Ilmu sosial dalam proses pribumisasi pada esensialnya harus membebaskan metodologi ilmu-ilmu sosial dari metodologi ilmu-ilmu alam dengan memberi pendasaran yang baru, sebab dalam realitas perkembangan ilmu sosial di Indonesia masih dipengaruhi oleh filsafat positivistik, dimana prosedur-prosedur metodologi dari ilmu-ilmu alam dapat diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, dan hasil penelitiannya dapat dirumuskan dalam hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam, sehingga ilmu-ilmu sosial harus bersifat teknsi, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, tidak bersifat etis dan juga tidak

²⁹ Lihat, Heri Santoso, hal. 190-197

³⁰ Pribumisasi sepadan dengan istilah *indigeneus* dalam bahasa Latin yang berarti asli atau pribumi. Terminologi pribumisasi pada dasarnya memiliki bermacam-macam makna. Misalnya, jika ditinjau dari aspek sosiologi pengetahuan, pribumisasi memiliki makna berbeda-beda di negara yang satu dengan negara yang lain. Istilah pribumisasi tidak begitu dikenal dalam wacana ilmu sosial di negara barat, namun pada negara-negara bekas jajahan pembicaraan pribumisasi menjadi diskusi menarik, terutama di Asia. Masing-masing negara di Asia memiliki variasi makna sesuai dengan konteks sosio politik. Lihat Heri Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal. 54

³¹ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, . 1987), hal. 3

Firdaus M. Yunus

terikat pada dimensi politis manusia. Dengan demikian ilmu-ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, bersifat netral, bebas dari nilai.³²

Untuk itu, ilmu-ilmu sosial dalam perkembangannya berusaha melakukan rekayasa sosial melalui proses kontekstualisasi asumsi-asumsi dasar dari teori sosial dalam disiplin ilmu masing-masing. Perkembangan ini harus dilihat dari sudut perkembangan dan rekayasa sosial, bahwa setiap disiplin ilmu mencoba menemukan peranan yang relevan dengan gerak langkah perubahan zaman, seperti dalam konteks negara Indonesia harus sesuai dengan budaya masyarakat dan gerak pembangunan. Dengan demikian tantangan yang harus dihadapi menemukan teori sosial baru yang sesuai dengan realitas sosial sekaligus dapat menentukan dinamika perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia.³³

G. Kesimpulan

Filsafat sosial meskipun sebagai salah satu cabang ilmu termuda, dibutuhkan untuk menganalisis sekaligus memberikan solusi terhadap kompleksitas persoalan sosial kemasyarakatan. Sebagai ilmu kritis, maka peran filsafat sosial dalam ranah kehidupan sosial harus berpartisipasi dalam melayani manusia. Oleh karena itu para ilmuan sosial harus menentukan keberpihakannya kepada siapa mereka melayani. Dengan demikian filsafat sosial harus menolak pemisahan antara teori dan praktek, dan semua praktek dan teori harus didiskusikan. Kepentingan praktek bagi ilmuan sosial adalah untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, dan kesemenaan teori-teori lain. Sebab ilmu sosial menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumen murni, yaitu pengetahuan harus dapat dipakai untuk keperluan apa saja sehingga tidak bersifat etis dan juga tidak terikat pada dimensi politis manusia, dengan demikian ilmu sosial bersifat netral dan bebas nilai. Karena sifatnya demikian, filsafat sosial melihat masyarakat sebagai kesatuan manusia dalam kebersamaan. Melalui kebersamaan itu kemudian filsafat sosial melihat struktur, proses dan makna sosial, baik pada masa lalu atau sekarang, yang

³² Lihat, Budi Hardiman, hal. 24

³³ Lihat. Heri Santoso dan Listiyono Santoso, hal. 53

di dalamnya mempelajari nilai-nilai, tujuan-tujuan individu, kelompok dan kelas sosial.

Dalam konteks keindonesiaan ilmu-ilmu sosial meskipun tergolong baru, karena secara akademis baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini, namun kegandrungan terhadap ilmu tersebut sudah setara dengan ilmu-ilmu lain. Untuk itu, tidak salah apabila muncul upaya pribumisasi ilmu-ilmu sosial yaitu sebuah upaya mencari format baru bagi karakter dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurut Novel Ali, bahwa 'membumikan' ilmu-ilmu sosial di Indonesia tidak berarti harus mengembangkan teori baru yang khas Indonesia, tetapi yang terpenting menyeleksi teori yang cocok untuk kondisi riil Indonesia.³⁴ Dengan demikian pribumisasi harus dimaknai (1) sebagai domestifikasi atau partikulasi, (2) membangun teori yang khas Indonesia, (3) menyeleksi secara sistematis teori yang sesuai dengan keadaan Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Donald E. Comstock, *A. Method for Critical Research*, Departement of Sociology, Washington State University, 1980.
- Edy A. Effendi (ed), *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Jakarta: Zaman, 1999.
- Gorge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimanda, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hans Fink, *Filsafat Sosial dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Heri Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.

³⁴ Lihat Novel Ali (dalam Suriasumantri), 1986, hal. 332

Firdaus M. Yunus

-----, "Dimensi epistemologis dalam indeginisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia (sebuah pelacakan awal)", dalam, *Jurnal filsafat*, Yogyakarta: UGM, 1997.

Heru Nograho, 'Pengilmiahan dan ambiguitas sosiologi'. Dalam, Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Immanuel Wallerstein, *Lintas Batas Ilmu Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1997.

K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia, 1983.

-----, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1975.

K.J. Veeger, *Realitas sosial; Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Lois O. Kattsof, *Pengantar filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI Press, 1986.

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terjemahan, Alimandan, Jakarta: Prenada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sunarto, 'Konstruksi epistemologi Max Horkheimer: Krtik atas Masyarakat Modern', dalam. *Epistemologi kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.

Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Mizan: Bandung, 1996.